

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu HUKUM*, PT Alumni, Bandung,
- Bagir Manan. 2001.*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Indra Bastian, 2009, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Irwansyah & Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Ed. Revisi, Mitra Buana Media., Yogyakarta
- H.M Arsyad Mawardi, 2013, *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Rasail Media Group, Semarang:
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Mukti Fajar MD & Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi, 2011,*Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M Hadjon and Titiek Sri Djatmayati, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Indonesia*. 2011 cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Romi Librayanto,2022, *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematika G. Jellinek*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta,Bandung

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta

Yusri Munaf, 2022, *Hukum Administasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Publishing, Pekanbaru

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Azwir Nasir dan Ranti Oktari, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 19, No. 02 (2011)

Beni Kurnia Ilahi dan Haikal, 2020, *Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kerugian Negara*, Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun.

Kezia M dkk, 2020, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /.

I Made Fajar Pradnyana & I Wayan Parsa, 2021, *Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2 Juli 2021,

Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*, *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*.

R Bayu Ferdian, Mohd Din, and M Gausyiah, "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018).

Samsul Falah, Dedi Budiman Hakim & A. Faroby Fatalehan, 2017, "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 9, No. 2, hlm. 24-38.

Syamsuwir dan Yusri Munaf, *Peran Inspektorat Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru* *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020.

Internet :

KOMISI XI, DPR RI, 2 Juli 2022, Kontribusi PNBPN 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara, diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39641/t/Kontribusi+PNBP+2021+Belum+Optimal+Dibandingkan+Total+Pendapatan+Negara>

Yusuf Imam Santoso,DDTC News, 6 Februari 2022, “ada Temuan dari BPK, DPR Minta Badan Pertanahan Segera Tindak Lanjuti” diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://news.ddtc.co.id/ada-temuan-dari-bpk-dpr-minta-badan-pertanahan-segera-tindaklanjuti-36690>

BPKP, 4 Oktober 2021, BPKP Tingkatkan Intensitas Pengawasan Agraria dan Pertanahan di Tahun 2022, diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://www.bpkp.go.id/berita/read/31823/0/BPKP-Tingkatkan-Intensitas-Pengawasan-Agraria-dan-Pertanahan-di-Tahun-2022>

BPKP, 4 Juli 2022, Sarasehan Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Menteri ATR, diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://www.bpkp.go.id/index.php?/berita/read/36568/29450/Sarasehan-Penyelesaian-Sengketa-Tanah-dengan-Menteri-ATR>

BPKP, 4 Oktober 2021, BPKP Tingkatkan Intensitas Pengawasan Agraria dan Pertanahan di Tahun 2022, diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://www.bpkp.go.id/berita/read/31823/0/BPKP-Tingkatkan-Intensitas-Pengawasan-Agraria-dan-Pertanahan-di-Tahun-2022>

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

LAMPIRAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592 Faksimile (0411) 590595
Email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : HM.02.03/S-198/PW21/1/2023 8 Februari 2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
di Makassar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 879/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 1 Februari 2023, hal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan kepada :

Nama : Andi Rahmatiah
No. Pokok : B12116520
Fakultas/Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Penelitian : "Analisis Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kota Makassar"

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023.

Untuk pelaksanaan teknis dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Analis SDM Aparatur Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Perwakilan
Kepala Bagian Umum

Jetro Fernando Sagala



Sesi Wawancara dan Konsultasi terkait pengawasan BPKP terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan Bapak Raden Kemal Ramdan selaku Koordinator Pengawasan Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP Pada 18 Februari 2023 di Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan